

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Jambi

Muhammad Amali^{1*}, Andri Devita²

¹Universitas Batanghari Jambi, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Jambi, Indonesia

*Correspondence email: m.amali278791@gmail.com, andridevita86@yahoo.com

Abstrak. Tulisan ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dengan menggunakan data panel dari kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi yang disajikan dari tahun 2010-2020. Hasil penelitian menggunakan pendekatan fixed effect model yang hasilnya pengeluaran perkapita dan jumlah penduduk yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan angkatan kerja justru tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi. Hubungan variabel saling keterkaitan antar daerah kabupaten/kota. Untuk peningkatan kemiskinan Kabupaten Batanghari diakibatkan keterkaitan dengan kondisi ekonomi Kota Jambi dengan kategori kuat yaitu 79,40 persen. Penurunan kemiskinan Kabupaten Bungo berkaitan dengan kondisi daerah Kabupaten Sarolangun dengan besar korelasi -67,90 persen dengan kategori kuat. Untuk Kemiskinan Kabupaten Kerinci peningkatannya disebabkan keterkaitan daerah Kota Jambi dengan besar korelasi 89,10 persen kategori hubungan yang sangat kuat. Untuk Kota Sungai Penuh peningkatan kemiskinannya akibat dari kondisi daerah Kota Jambi dengan besar korelasi 65,40 persen kategori kuat. Untuk Kabupaten Merangin peningkatan kemiskinannya disebabkan keterkaitan dengan kondisi daerah Kabupaten Tebo dengan besar korelasinya 95,80 persen kategori sangat kuat. Untuk peningkatan kemiskinan di Kabupaten Muaro Jambi berkaitan dengan kondisi daerah Kabupaten Batanghari dengan besar korelasi 72,60 persen kategori kuat. Untuk peningkatan kemiskinan di Kabupaten Tanjabbar berkaitan dengan kondisi daerah Kabupaten Tebo dengan besar korelasi 96,60 persen kategori sangat kuat. Dan untuk peningkatan kemiskinan di Kabupaten Tanjabtim berkaitan dengan kondisi daerah Kabupaten Tanjabbar dengan besar korelasi 84,90 persen kategori sangat kuat.

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi; pengeluaran perkapita; jumlah penduduk; indeks pembangunan manusia; angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin

Abstract. This paper analyzes the factors that influence poverty by using panel data from districts/cities in Jambi Province which are presented from 2010-2020. The results of the study used a fixed effect model approach which resulted in per capita expenditure and population which had a significant influence on the number of poor people in districts/cities in Jambi Province. Meanwhile, the variables of economic growth, human development index and labor force do not have a significant effect on poverty in districts/cities in the Jambi Province. Variable relationships are interrelated between districts/cities. The increase in poverty in Batanghari Regency is due to the relationship with the economic conditions of Jambi City with a strong category of 79.40 percent. The decrease in poverty in Bungo Regency is related to the condition of the Sarolangun Regency area with a large correlation of -67.90 percent with a strong category. The increase in poverty in Kerinci Regency is due to the regional linkage of Jambi City with a large correlation of 89.10 percent, a very strong relationship category. For Sungai Penuh City, the increase in poverty is due to the condition of the Jambi City area with a correlation of 65.40 percent in the strong category. For Merangin Regency, the increase in poverty is due to the relationship with regional conditions in Tebo Regency with a large correlation of 95.80 percent in a very strong category. The increase in poverty in Muaro Jambi Regency is related to regional conditions in Batanghari Regency with a large correlation of 72.60 percent in the strong category. The increase in poverty in Tanjabbar Regency is related to the condition of the Tebo Regency area with a correlation of 96.60 percent, the category is very strong. And for the increase in poverty in Tanjabtim Regency, it is related to the condition of the Tanjabbar Regency area with a large correlation of 84.90 percent, the category is very strong.

Keywords: economic growth; per capita expenditure; total population; human development index; labor force and the number of poor people

PENDAHULUAN

Mengatasi kemiskinan saat ini bukan termasuk kegiatan amal, namun merupakan kewajiban sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia yang fundamental. Hal ini dikarenakan selagi ada kemiskinan maka tidak ada kemardekaan sejati yang dirasakan oleh individu ataupun masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah ekonomi yang saat ini tetap eksis dipersoalkan di setiap negara. Kebanyakan orang tidak menginginkan miskin, akan tetapi faktor penyebab miskin itu tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada (Sanjaya et al., 2018). Untuk itu beberapa negara berupaya melakukan kebijakan untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut.

Suatu negara dapat dikatakan akan tetap miskin jika untuk mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi, mengalami kesulitan dikarenakan adanya lingkaran kemiskinan yang menjadikan faktor penyebab berkaitan antara satu sama lain. Inti dari persoalan ini dapat diasumsikan : (1) adanya keterbatasan dalam menabung atau saving; (2) rendahnya kegiatan modal untuk berinvestasi; (3) rendahnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat. Hal tersebut

yang dapat menghambat pencapaian keberhasilan dalam pembangunan ekonominya di berbagai negara sedang berkembang (Arsyad, 2010). Provinsi Jambi yang merupakan daerah otonom, telah berupaya mengatasi persoalan peningkatan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan lapangan di Provinsi Jambi tidak ada perubahan yang nyata dari penurunan penduduk miskin. Kemiskinan di Provinsi Jambi tetap mengalami peningkatan ditambah kondisi saat pandemi covid-19 menyebabkan terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di tahun 2020 sebesar 1,27 persen yang diikuti penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,46 persen. Adanya persoalan ini, dapat memberikan gambaran adanya korelasi positif pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan di daerah Provinsi Jambi.

Ada beberapa identifikasi masalah yang dihadapi dalam rangka meminimalkan jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi. Berdasarkan Hipotesis Kuznets (dalam Syekh, 2014), terdapat korelasi negatif antara kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi. Namun hal ini bertentangan dengan hipotesis Kuznet, dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru dapat menyebabkan imigrasi penduduk. Sehingga jumlah penduduk akan meningkat dapat menjadi persoalan yang dapat menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi dan akan bertambahnya penduduk miskin kedepannya. Karena peningkatan jumlah penduduk dapat berdampak pada peningkatan pengeluaran perkapita masyarakat untuk kegiatan konsumtif. Ini tentunya dapat meningkatnya produksi output guna memenuhi kebutuhan hidup berupa barang dan jasa. Guna memenuhi peningkatan output barang dan jasa tentu sejalan atau berkaitan dengan peningkatan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Jambi tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada dapat mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi. Keterkaitan kemiskinan dengan indeks pembangunan manusia sangat besar karena memberikan pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi.

Determinan variabel-variabel (pertumbuhan ekonomi, pengeluaran perkapita, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia dan angkatan kerja) tersebut dapat mempengaruhi kemiskinan, sehingga dalam tulisan ini perumusan masalahnya yaitu sebagai berikut : 1) Berapa besar pengaruh dari variabel determinan kemiskinan di wilayah kabupaten/kota Provinsi Jambi?. dan 2). Berapa besar nilai korelasi pearson antara variabel determinan kemiskinan di wilayah kabupaten/kota Provinsi Jambi?.

Tinjauan Pustaka Kemiskinan

Analisis kemiskinan menjadi semakin rumit karena faktor dan karakteristik baru diperhitungkan dalam visi yang lebih global, mengingat bahwa individu tidak hanya bergantung pada tingkat konsumsi makanan; mereka juga bergantung pada kekuatan integrasi ke dalam masyarakat dan akses ke kebutuhan moral dan sosial yang berbeda (Rami B.H, 2019). Ada tiga ciri utama penyebab negara berkembang miskin yaitu diantaranya 1). rendahnya prasarana dan sarana pendidikan, 2). kurangnya sarana kesehatan dan pola hidup yang buruk menjadi penyebab produktivitas kerja sebagian masyarakat rendah, 3). kecenderungan bekerja masih didominasi di sektor pertanian dan pertambangan (Jhingan, 2012). Kemiskinan terbagi dua, yakni kemiskinan absolute dan kemiskinan relatif, Kemiskinan absolute ialah orang-orang atau masyarakat yang berada pada garis kemiskinan atau mereka yang benar-benar miskin. Sedangkan kemiskinan relative adalah mereka miskin bila dibanding dengan masyarakat sekitarnya. Jadi masalah utama dalam ekonomi adalah kemiskinan absolute. Sebab-sebab kemiskinan tersebut menurut Syekh (2014) adalah : 1). Rendahnya produktivitas pertanian dan non pertanian. 2). Kurangnya prasarana dan sarana. 3). Sektor moneter yang belum maju. 4). Kurangnya pendidikan dan tenaga terampil. 5). Kualitas sumberdaya manusia rendah. 6). Tabungan rendah di negara miskin. 7). Fertilitas penduduk tinggi dan 8). Banyaknya penduduk yang tidak bekerja.

Todaro (2006) dapat menjelaskan bahwa persoalan tentang kemiskinan di negara sedang berkembang tidak memiliki ujung pangkalnya. Karena semua unsur dapat menyebabkan kemiskinan akan saling berhubungan atau berkaitan satu dengan lainnya yang dapat menjadikan mata rantai kemiskinan yang dikenal dengan *The Vicious Circle of Poverty* menurut *Teori Nurkse* (Sumanto, 2005). Hal ini sejalan dengan penelitian Sumanto (2005) dengan contoh kasus lingkaran kemiskinan di Indonesia.

Sedangkan menurut Todaro (Syekh, 2014 :141) *claimed that the vicious cycle of poverty in developing countries can be described as the interlocking of low productivity, low income per capita, low level of savings, and low level of investment in physical and human capital. Because of low productivity, the income per-capita is low, thus the level of savings is very low. Moreover, saving is the initial condition for investment, thus the low level of savings leads to low investment, so the low productivity has impact to low income and low standard of living (poverty). At this point, the vicious cycle of poverty is restated.*

Pertumbuhan Ekonomi

Daerah dapat dikatakan berhasil atau tidaknya dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dapat dilihat tolak ukurnya dari pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan dari pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan daerahnya terutama dalam persoalan kemiskinan. Menurut Siregar dan Wahyuni (2007) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, namun pengaruh yang diberikan oleh pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah ekonomi. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi

yang berkualitas dan berkeadilanlah yang mampu meminimalisir kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi meningkat dapat diyakini akan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin. Artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Namun, kondisi ini dapat saja berbeda antar daerah satu dengan lainnya. Perbedaan keadaan daerah tentu dilihat dari distribusi pendapatan, jumlah penduduk, urbanisasi, faktor endowment daerah memiliki keterkaitan dalam menentukan pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dengan penurunan jumlah penduduk miskin (Hasan dan Quibria, 2002). Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan memiliki hubungan dua arah yang kuat. Dimana pertumbuhan ekonomi dapat berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan atau sebaliknya kemiskinan juga dapat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Jonaidi, 2012).

Ada beberapa penelitian yang berkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Berardi dan Marzo (2017), menemukan pertumbuhan ekonomi dilihat dari sectoral berpengaruh langsung terhadap penurunan kemiskinan di negara-negara Afrika, terutama pertumbuhan di sektor *pro-poor* yang mendominasi kantong-kantong kemiskinan. Menurut Rose, dkk (2013), menemukan kemiskinan di negara Pakistan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi secara signifikan yang didasari oleh pertumbuhan sektor industri. Hal yang sama, berdasarkan penelitian Hasan dan Quibria (2002) mengungkapkan sektor industri berpengaruh besar terhadap penurunan kemiskinan di Asia Barat, sedangkan di Amerika latin, Asia Selatan dan Afrika justru sektor pertanian yang memiliki pengaruh lebih besar dalam menurunkan kemiskinan.

Pengeluaran Perkapita

Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) menjelaskan pengertian pengeluaran perkapita, yaitu total biaya keseluruhan anggota keluarga yang dikeluarkan untuk mengkonsumsi. Menurut pendapat dari Halim (2018) pengeluaran perkapita yaitu total pengeluaran dari rumah tangga dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seluruh anggota rumah tangga untuk membeli barang dan jasa selama periode tertentu. Pengeluaran perkapita dipengaruhi pendapatan yang diperoleh rumah tangga, jika penghasilan turun maka rumah tangga akan menurunkan pengeluaran konsumsi kebutuhan barang dan jasa untuk hidup. Kebutuhan dasar rumah tangga berupa kebutuhan primer yaitu papan, sandang dan pangan yang mesti dipenuhi untuk terbebas dari garis kemiskinan yang ditetapkan. Sehingga kenaikan pengeluaran perkapita akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tentunya dapat menurunkan kemiskinan. Finkayana dan Dewi (2016) menyimpulkan pengeluaran perkapita berkorelasi negatif serta signifikan terhadap kemiskinan.

Jumlah Penduduk

Keterkaitan antara penduduk dengan kemiskinan dapat dilihat dari persentase beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif terhadap penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. Penduduk dianggap sebagai media penting dalam menunjang terciptanya pembangunan daerah yang signifikan. Karena penduduk merupakan lumbung dari tenaga kerja, tenaga ahli dan tenaga usahawan yang diperlukan dalam pembangunan daerah yang efektif. Dengan adanya penambahan jumlah penduduk akan menyebabkan terjadi perluasan pasar yang tentunya dapat meningkatkan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi. Namun pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menjadi permasalahan serius bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan sebuah wilayah. Pertambahan penduduk yang tidak diikuti dengan penyediaan lapangan kerja dapat menyebabkan permasalahan yaitu berupa pengangguran, kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan itu, maka diperlukan pembatasan dan pengurangan pertumbuhan jumlah penduduk. Selain itu perlu dilakukan perbaikan dan penyediaan fasilitas yang dapat meningkatkan kualitas penduduk melalui pendidikan dan kesehatan. Tujuan yang diharapkan yaitu membuat kualitas penduduk meningkat dan mengurangi angka kemiskinan (Kuncoro, 2010). Todaro (2006), jumlah penduduk dapat berpengaruh positif terhadap kemiskinan berdasarkan hasil perhitungan dari Indeks Foster Greer Thorbecke (FGT), hasil yang diperoleh yaitu dengan meningkatnya jumlah penduduk, tentu jumlah penduduk miskin ikut bertambah.

Human Development Index (HDI)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ukuran capaian pembangunan manusia untuk melihat kesejahteraan masyarakat. Komponen dasar kualitas hidup yaitu berupa usia hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak. Aspek usia hidup dapat dilihat dari angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, aspek pengetahuan dapat diukur dari angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah yang mewakili bidang pendidikan, aspek standar hidup layak dapat dilihat dari pengeluaran perkapita yang disesuaikan (BPS, 2010). Menurut Mankiw (2007), modal dari manusia yaitu kualitas dirinya dalam dunia kerja dapat diukur melalui tingkat pendidikan. Sektor pendidikan sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga Indeks Pembangunan Manusia juga meningkat kedepannya. Permasalahan kemiskinan dapat timbul karena kurangnya kualitas dari sumber daya manusia. Sebagai syarat penting bagi berlangsungnya pembangunan ekonomi secara berkesinambungan, sangat efektif untuk memutuskan mata rantai kesenjangan di masyarakat yang berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan (Sjafi'i dan Hidayanti, 2009).

Angkatan Kerja

Kesempatan kerja dapat menjadi problem dalam pembangunan ekonomi. Dengan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan lapangan kerja baru dapat meningkatkan jumlah pengangguran suatu daerah. Dampak dari peningkatan pengangguran tentunya akan meningkatkan angka kemiskinan. Maka dari itu ketenagakerjaan dan kualitas pekerjaan yang layak sangat penting untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Penduduk miskin dapat terlepas dari kemiskinan melalui adanya peningkatan kesempatan kerja (Khan, 2007). Angkatan kerja yang tinggi mampu menggerakkan peningkatan kegiatan perekonomian yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika seluruh angkatan kerja dapat terserap oleh kesempatan kerja untuk masyarakat.

METODE

Penelitian ini yang disajikan dalam bentuk panel dari data keseluruhan daerah di Provinsi Jambi selama periode tahun 2010-2020 dengan data yang akan dianalisis yaitu sebagai berikut: Data Kabupaten/Kota berupa data jumlah penduduk miskin, data pertumbuhan ekonomi, data pengeluaran perkapita, data jumlah penduduk, data indeks pembangunan manusia dan data angkatan kerja kabupaten/kota dari BPS Provinsi Jambi. Sumber data dalam penelitian ini antara lain berupa dari Badan Pusat Statistik, BPS Provinsi Jambi, BPS Kabupaten/Kota Dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi. Untuk menjawab permasalahan pertama terkait pengaruh independent berupa (pertumbuhan ekonomi (X_{1it}), pengeluaran perkapita (X_{2it}), jumlah penduduk (X_{3it}), variabel pembangunan manusia (X_{4it}) dan variabel angkatan kerja (X_{5it})) terhadap variabel dependent (yaitu kemiskinan berupa data jumlah penduduk miskin (Y_{it})) di wilayah kabupaten/kota Provinsi Jambi yang melalui Eviews seri 8.0 dengan spesifikasi model ekometrikanya yaitu sebagai berikut : $LogY_{it} = \beta_{0it} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 LogX_{2it} + \beta_3 LogX_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 LogX_{5it} + e_{it}$

Model estimasi dalam penelitian ini ada tahapan analisisnya yaitu dengan metode kuadran terkecil (*Pooled Least Square/PLS*), metode efek tetap (*Fixed Effect Model/FEM*) dan metode efek random (*Random Effect Model/REM*). Namun ketiga metode estimasi ini perlu tahapan pengujian terlebih dahulu melalui uji chow dan uji hausman guna memperoleh metode pendekatan yang tepat dalam menganalisis regresi panel data. Untuk menjawab tujuan kedua terkait besar nilai korelasi pearson antara variabel independent yaitu (X_{1it} (untuk variabel pertumbuhan ekonomi), X_{2it} (untuk variabel pengeluaran perkapita), X_{3it} (untuk variabel jumlah penduduk), X_{4it} (untuk variabel indeks pembangunan manusia) dan X_{5it} (untuk variabel angkatan kerja) terhadap variabel dependent yaitu Y_{it} (untuk variabel jumlah penduduk miskin) kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

HASIL

Tabel 1
Hasil Eviews 8.0 Dengan Uji Chows

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	207.542667	(10,94)	0.0000
Cross-section Chi-square	345.281576	10	0.0000

Sumber: data olahan

Tabel 1 diperoleh nilai Prob. Cross-section F yaitu 0,0000 lebih kecil dari alpha 5 %, sehingga hasil disimpulkan baik dengan metode *Fixed Effect Model* bila dibandingkan menggunakan metode *Pooled Least Square/PLS*. Selain itu metode yang baik antara metode dengan *Fixed Effect Model/FEM* dan dibandingkan dengan metode *Random Effect Model/REM*) dapat dilakukan dengan tahapan hausman test.

Tabel 2
Hasil Eviews 8.0 Dengan Hausman Test

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	12.552452	5	0.0280

Sumber: data olahan

Hasil terlihat besar Prob. Cross-section random yang nilainya 0,0280 lebih kecil dari alpha 5 % maka pendekatan metode *Fixed Effect Model/FEM* lebih baik dibandingkan pendekatan metode *Random Effect Model/REM*. Sehingga dapat disimpulkan antara metode kuadran terkecil (*Pooled Least Square/PLS*) dengan metode efek tetap (*Fixed Effect Model/FEM*) maka metode metode efek tetap (*Fixed Effect Model/FEM*) yang lebih baik digunakan. Dan jika dibandingkan metode efek tetap (*Fixed Effect Model/FEM*) dengan metode efek random (*Random Effect*

Model/REM) dapat ditentukan metode metode efek tetap (Fixed Effect Model/FEM) yang lebih baik digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3
Hasil Eviews 8.0 Dengan Metode Efek Tetap (Fixed Effect Model/FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.563312	4.403318	2.171842	0.0324
X1?	0.001433	0.003740	0.383062	0.7025
LOG(X2?)	-0.793732	0.306504	-2.589627	0.0111
LOG(X3?)	1.086863	0.266744	4.074562	0.0001
X4?	0.017328	0.012197	1.420681	0.1587
LOG(X5?)	-0.142935	0.138840	-1.029496	0.3059
Fixed Effects (Cross)				
BATANGHARI—C	0.313525			
BUNGO—C	-0.191637			
KERINCI—C	-0.020647			
KOTAJAMBI—C	0.206305			
KOTASUNGAIPENUH—C	-0.995331			
MERANGIN—C	0.193363			
MUAROJAMBI—C	-0.645669			
SAROLANGUN—C	0.353693			
TANJABBARAT—C	0.372380			
TANJABTIMUR—C	0.506116			
TEBO—C	-0.092098			

Sumber: data olahan

Berdasarkan hasil tabel diatas, maka model panel regresinya menggunakan Metode Efek Tetap (Fixed Effect Model/FEM) dapat ditulis persamaannya yaitu :

$$\text{Log}Y_{it} = 9,5633 + 0,0014X_{1it} - 0,7937\text{Log}X_{2it} + 1,0869\text{Log}X_{3it} + 0,0173X_{4it} - 0,1429\text{Log}X_{5it} + \mu_{it}$$

Pembahasan dapat dilihat ada nilai dari β_{0it} yaitu angka bernilai 9,5633 yang memiliki makna yaitu selama periode tahun 2010-2020 nilai variabel independent yaitu untuk pertumbuhan ekonomi (X_{1it}), pengeluaran perkapita (X_{2it}), jumlah penduduk (X_{3it}), variabel pembangunan manusia (X_{4it}) dan variabel angkatan kerja (X_{5it}) tidak mengalami perubahan antara daerah kabupaten/kota lainnya diwilayah Provinsi Jambi maupun antara waktu atau dengan asumsi konstan, maka kemiskinan (Y_{it}) di kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi selama periode tersebut mengalami peningkatan sebesar 9,5633 jiwa atau dibulatkan menjadi 10 jiwa pertahun. Berdasarkan nilai hasil yang di atas, membuktikan bahwa fundamental permasalahan kemiskinan di Provinsi Jambi di pengaruhi keseluruhan variabel bebas ini memiliki keterkaitan satu sama lainnya dan sulit dipisahkan baik itu antara daerah maupun antar waktu di wilayah Provinsi Jambi.

Perbedaan antar daerah di wilayah Provinsi Jambi dapat dihitung konstanta (β_0) untuk koefisien masing-masing daerah di Provinsi Jambi dapat dirumuskan :

$$\text{Konstanta individu daerah ke-i} = \text{Konstanta Keseluruhan} (\beta_0) + \text{Konstanta ke i} (\beta_{0i})$$

Hasil perhitungan konstanta daerah di wilayah Provinsi Jambi dapat diperoleh hasil yaitu :

β_0 untuk BATANGHARI = 9,563312 + 0,313525 = 9,876837
β_0 untuk BUNGO = 9,563312 - 0,191637 = 9,371675
β_0 untuk KERINCI = 9,563312 - 0,020647 = 9,542665
β_0 untuk KOTAJAMBI = 9,563312 + 0,206305 = 9,769617
β_0 untuk MERANGIN = 9,563312 - 0,995331 = 8,567981
β_0 untuk MUAROJAMBI = 9,563312 + 0,193363 = 9,756675
β_0 untuk SAROLANGUN = 9,563312 - 0,645669 = 8,917643
β_0 untuk SUNGAIPENUH = 9,563312 + 0,353693 = 9,917005
β_0 untuk TANJABBARAT = 9,563312 + 0,372380 = 9,935692
β_0 untuk TANJABTIMUR = 9,563312 + 0,506116 = 10,069428
β_0 untuk TEBO = 9,563312 - 0,092098 = 9,471214

sumber: data olahan

Hasil dengan Metode Efek Tetap (*Fixed Effect Model/FEM*) ini dapat dilihat ada perbedaan dari 11 daerah kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Jambi dalam mengatasi persoalan kemiskinan (Y_{it}) selama periode 2010-2020. Perbedaan itu dapat dilihat dari perbedaan koefisien β_0 (konstanta) antar kabupaten/kota. Untu daerah di Kabupaten Merangin memiliki β_0 (konstanta) terendah yaitu sebesar 8,567981 dengan maknanya yaitu jika bila mana ada perubahan variabel (pertumbuhan ekonomi (X_{1it}), variabel pengeluaran perkapita (X_{2it}), variabel jumlah penduduk (X_{3it}), variabel indeks pembangunan manusia (X_{4it}) dan variabel angkatan kerja (X_{5it})) baik antara daerah kabupaten dan kota maupun antar waktu, maka Kabupaten Merangin mendapatkan pengaruh individu terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin terendah sebesar 8,567 jiwa atau dibulatkan jumlah penduduk miskin menjadi 9 jiwa pertahun dengan asumsi variabel lain dalam keadaan konstan atau *ceteris paribus* untuk daerah lain Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi dalam periode tahun 2010-2020.

Rendahnya nilai intersep Kabupaten Merangin disebabkan Kabupaten ini daerah yang kaya atas potensi alam serta kaya akan mineral tambang yang seluruhnya belum dapat dieksploitasi dan dimanfaatkan seperti batu bara, semen, emas, minyak bumi (fosil) dan potensi lainnya. Hal ini yang menyebabkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Merangin berdampak lebih kecil bila dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Jambi periode 2010-2020. Selain itu Kabupaten Merangin sebagai Kabupaten induk telah berupaya memaksimalkan hasil kekayaan daerah yang dimilikinya agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan upaya pemerintah daerah dalam wujud nyata meminimalkan kemiskinan di daerah Kabupaten Merangin.

Sebaliknya daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) memiliki β_0 (konstanta) tertinggi sebesar 10,069428 dengan maknanya yaitu jika bila mana ada perubahan variabel (pertumbuhan ekonomi (X_{1it}), variabel pengeluaran perkapita (X_{2it}), variabel jumlah penduduk (X_{3it}), variabel indeks pembangunan manusia (X_{4it}) dan variabel angkatan kerja (X_{5it})) baik antara daerah maupun antar waktu baik, maka Kabupaten Tanjabtim mendapatkan pengaruh individu terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin tertinggi yaitu sebesar 10,069 jiwa atau dibulatkan jumlah penduduk miskin menjadi 10 jiwa pertahun dengan asumsi variabel lain dalam keadaan konstan atau *ceteris paribus* untuk daerah lain Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi dalam periode tahun 2010-2020.

Untuk variabel bebas pertumbuhan ekonomi (X_{1it}) dan indeks pembangunan (X_{4it}) dapat dilihat dari tabel 4 memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jambi, namun tidak berpengaruh signifikan karena besar nilai prob. diatas alpha yang digunakan yaitu 5 %. Artinya dapat disimpulkan jika terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia, namun kedua variabel tersebut tidak ada pengaruh yang signifikan atas perubahan jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Jambi, sehingga jumlah penduduk miskin tidak menurun dan tidak dapat teratasi dengan kenaikan dari pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Sedangkan untuk variabel angkatan kerja (X_{5it}) dapat dilihat dari tabel 4 memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jambi, namun juga tidak berpengaruh signifikan karena nilai prob. diatas alpha yang digunakan yaitu 5%. Artinya dapat disimpulkan jika ada kenaikan angkatan kerja, tetapi ada pengaruh perubahan kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jambi, akan tetapi tidak diikuti penurunan kemiskinan tidak dapat diatasi dengan meningkatkan angkatan kerja kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Untuk variabel pengeluaran perkapita (X_{2it}) justru berpengaruh signifikan dengan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jambi dengan nilai prob. dibawah alpha yang digunakan yaitu 5%. Sehingga dapat disimpulkan jika pengeluaran perkapita meningkat 1% berarti masyarakat tersebut dianggap mampu memenuhi kebutuhan primernya. Hal ini tentu dapat mengurangi kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jambi sebesar 0,79%. Sedangkan untuk jumlah penduduk (X_{3it}) juga berpengaruh signifikan dengan memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jambi dengan nilai prob. dibawah alpha yang digunakan yaitu 5%. Sehingga dapat disimpulkan jika ada penambahan jumlah penduduk 1% dapat menjadi beban dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah. dikarenakan kualitas sumber daya manusia Provinsi Jambi masih belum optimal karena terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas dengan pendidikan masih rendah. Selain itu, alasan penduduk dipandang sebagai pengambat pembangunan ekonomi, dikarenakan peningkatan jumlah penduduk yang tinggi yang tidak dibarengi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja, dinilai hanya menambah beban pembangunan ekonomi saja. Tentu jumlah penduduk yang besar akan memperkecil nilai pendapatan perkapita dan menimbulkan problem baru dari ketenagakerjaan dan meningkatnya pengangguran tentu kemiskinan daerah di Provinsi Jambi juga akan meningkat

Tabel 4
Uji t-Test Hasil Eviews 8.0 Model Fixed Effect (FEM)

Variable	t-Statistic	Prob.
C	2.171842	0.0324
X1?	0.383062	0.7025
LOG(X2?)	-2.589627	0.0111
LOG(X3?)	4.074562	0.0001

X4?	1.420681	0.1587
LOG(X5?)	-1.029496	0.3059

t-tabel = 2,447 dengan Alpha yang digunakan 5%

sumber: data olahan

Hasil olahan regresi panel pendekatan Metode Efek Tetap (*Fixed Effect Model/FEM*), untuk uji t secara parsial dengan tingkat keyakinan Alpha = 5%, maka masing-masing variabel independent dapat dilihat tingkat signifikansinya dengan variabel dependent dimana dapat diperoleh sebagai berikut :

- 1) Variabel pertumbuhan ekonomi (X_{1it}) untuk (β_1) nilai t-statistic < dari t-tabel ($0,383 < 2,447$) sehingga pernyataan H_0 diterima H_1 ditolak. Artinya membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi (X_{1it}) selama periode 2010-2020 memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2010-2020.
- 2) Nilai t-statistic untuk variabel pengeluaran perkapita (X_{2it}) (β_2) yang nilainya > t-tabel ($2,589 > 2,447$) sehingga diperoleh pernyataan H_0 ditolak H_1 diterima. Artinya terbukti bahwa pengeluaran perkapita (X_{2it}) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penurunan kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode tahun 2010-2020.
- 3) Nilai t-statistic untuk variabel jumlah penduduk (X_{3it}) (β_3) berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode tahun 2010-2020. Berdasarkan hasil diperoleh nilai t-statistik > dari t-tabel ($4,074 > 2,447$) sehingga diperoleh pernyataan bahwa H_0 ditolak H_1 diterima. Dapat diartikan jumlah penduduk (X_{3it}) berpengaruh signifikan dengan kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada tingkat keyakinan α dibawah 5 %.
- 4) Untuk variabel indeks pembangunan manusia (X_{4it}) (β_4) diperoleh nilai t-statistik < dari t-tabel ($1,421 < 2,447$) artinya H_0 diterima H_1 ditolak. Maka Indeks Pembangunan Manusia (X_{4it}) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan dengan kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jambi (Y) periode tahun 2010-2020 dengan tingkat keyakinan α diatas 5 %.
- 5) Untuk nilai t-statistik variabel angkatan kerja (X_{5it}) (β_5) tidak signifikan terhadap penurunan kemiskinan kabupaten/kota Provinsi Jambi selama periode tahun 2010-2020. Berdasarkan hasil diperoleh nilai t-statistik < t-prob ($1,029 > 2,447$) sehingga diperoleh pernyataan H_0 diterima H_1 ditolak. Artinya bahwa angkatan kerja (X_{5it}) tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Jambi dengan tingkat keyakinan α diatas 5 % (tingkat keyakinan α sebesar 30,59 %).

Tabel 5
Uji F-Test

F-statistic	850.9337	Durbin-Watson stat	0.707640
Prob(F-statistic)	0.000000		

F-tabel =5,192 dengan Alpha 5%

sumber: data olahan

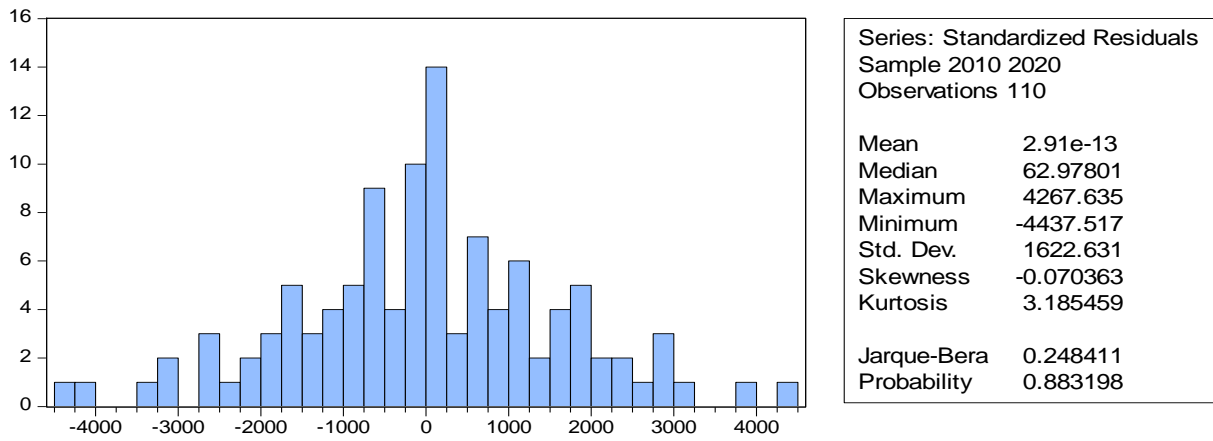
Diperoleh nilai dari F-statistic > nilai F-tabel ($850,9337 > 5,192$) sehingga dapat diperoleh pernyataan H_0 ditolak dan H_1 diterima. Secara bersama-sama atau simultan variabel-variabel independent memiliki pengaruh signifikan terhadap dependent kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2010 hingga 2020. Ini jelas bahwa yang menjadi fundamental kemiskinan di Provinsi Jambi dapat diminimalisir jika ada perubahan atau peningkatan variabel-variabel independent tersebut.

Tabel 6
Tingkat Signifikansi

R-squared	0.992689	Mean dependent var	9.956516
Adjusted R-squared	0.991523	S.D. dependent var	0.715677

sumber: data olahan

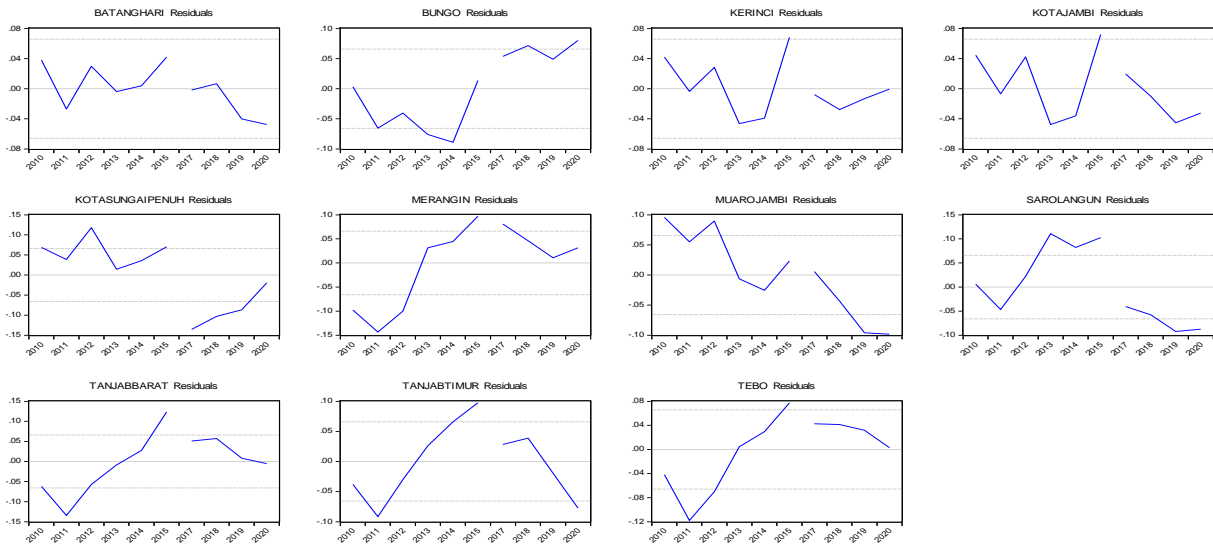
Nilai R-squared pada tabel 6 diatas diperoleh nilai sebesar 0,992689. Memiliki makna, bahwa sekitar 99,27 persen naik turunnya kemiskinan (Y_{it}) kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2010 hingga 2020, dipengaruhi oleh variabel-variabel independent dalam penelitian ini. Sedangkan sisanya 0,63 persen, yang mempengaruhi kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jambi dipengaruhi oleh variabel lainnya.



Sumber: data olahan

Gambar 1
Jarque-Bera

Dapat dilihat pada hasil jarque-bera, dimana penelitian ini menggunakan alpha 5% dengan menggunakan data panel pendekatan model fixed effect. Jika besar nilai prob. Jarque-Bera (0,883198) besar dari alpha 5% maka dapat disimpulkan seluruh data normal selama periode 2010-2020. Gambar 2 terlihat fundamental penyebaran tertinggi terjadi di Kabupaten Tanjabtim, sedangkan terendah fundamental penyebarannya terjadi di Kabupaten Merangin. Disimpulkan bahwa Kabupaten Merangin mampu mengatasi fundamental kemiskinan lebih baik dibandingkan daerah lainnya di wilayah Provinsi Jambi dalam periode tahun 2010 hingga 2020.



Sumber: data olahan

Gambar 2
Penyebaran PerKabupaten/Kota Di Provinsi Jambi

Tabel 7
Korelasi Pearson dengan Eviews 8.0

Corelation	BTH	Bungo	Kerinci	KotaJMB	KotaSP	MRG	MuaroJMB	SLG	TJB	TJT	Tebo
Batanghari	1,000	-0,235	0,569	0,794	0,513	-0,021	0,726	0,643	0,251	0,523	0,095
Bungo	-0,235	1,000	0,192	0,090	-0,640	0,393	-0,489	-0,679	0,423	-0,063	0,454
Kerinci	0,569	0,192	1,000	0,891	0,507	-0,187	0,523	0,116	0,080	-0,012	-0,069
Kotajambi	0,794	0,090	0,891	1,000	0,432	-0,130	0,714	0,255	0,155	0,196	-0,039
Kotasungai pentuh	0,513	-0,640	0,507	0,432	1,000	-0,516	0,654	0,586	-0,366	-0,103	-0,489
Merangin	-0,021	0,393	-0,187	-0,130	-0,516	1,000	-0,604	0,196	0,934	0,751	0,958
Muarojambi	0,726	-0,489	0,523	0,714	0,654	-0,604	1,000	0,406	-0,417	-0,081	-0,563
Sarolangun	0,643	-0,679	0,116	0,255	0,586	0,196	0,406	1,000	0,258	0,630	0,174
Tanjabbarat	0,251	0,423	0,080	0,155	-0,366	0,934	-0,417	0,258	1,000	0,849	0,966
Tanjabtimur	0,523	-0,063	-0,012	0,196	-0,103	0,751	-0,081	0,630	0,849	1,000	0,792
Tebo	0,095	0,454	-0,069	-0,039	-0,489	0,958	-0,563	0,174	0,966	0,792	1,000

Sumber: data olahan

Kabupaten Batanghari

- Hasil tabel 8 diatas maka di peroleh koefisien korelasi untuk Kabupaten Batanghari dengan Kabupaten Bungo sebesar -0,235. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Bungo akan berdampak berkurangnya kemiskinan di Kabupaten Batanghari yang mana $r = -0,235$ atau 23,50 persen (nilai korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Bungo memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan Kabupaten Batanghari sebesar 23,50 persen atau katagori rendah).
- Nilai koefisien korelasi untuk Kabupaten Batanghari dengan Kabupaten Kerinci sebesar 0,569. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Kerinci akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Batanghari yang mana $r = 0,569$ atau 56,90 persen (nilai korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Kerinci memiliki hubungan positif dengan kemiskinan Kabupaten Batanghari sebesar 56,90 persen atau katagori sedang).
- Nilai koefisien korelasi untuk Kabupaten Batanghari dengan Kota Jambi sebesar 0,794. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kota Jambi akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Batanghari yang mana $r = 0,794$ atau 79,40 persen (nilai korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kota Jambi memiliki hubungan positif dengan kemiskinan Kabupaten Batanghari sebesar 79,40 persen atau katagori kuat).
- Nilai koefisien korelasi untuk Kabupaten Batanghari dengan Kota Sungai Penuh sebesar 0,514. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kota Sungai Penuh akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Batanghari yang mana $r = 0,513$ atau 51,30 persen (nilai korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kota Sungai Penuh memiliki hubungan positif dengan kemiskinan Kabupaten Batanghari sebesar 51,30 persen atau katagori sedang).
- Nilai koefisien korelasi untuk Kabupaten Batanghari dengan Kabupaten Merangin sebesar -0,021. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Merangin akan berdampak menurunkan kemiskinan di Kabupaten Batanghari yang mana $r = 0,021$ atau 2,10 persen (nilai korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Merangin memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan Kabupaten Batanghari sebesar 2,10 persen atau katagori sangat rendah).
- Nilai koefisien korelasi untuk Kabupaten Batanghari dengan Kabupaten Muaro Jambi sebesar 0,726. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Batanghari yang mana $r = 0,726$ atau 72,60 persen (nilai korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Muaro Jambi memiliki hubungan positif dengan kemiskinan Kabupaten Batanghari sebesar 72,60 persen atau katagori kuat).
- Nilai koefisien korelasi untuk Kabupaten Batanghari dengan Kabupaten Sarolangun sebesar 0,643. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Sarolangun akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Batanghari yang mana $r = 0,643$ atau 64,30 persen, Kabupaten Sarolangun mempunyai korelasi positif dengan kemiskinan Kabupaten Batanghari sebesar 64,30 persen atau katagori kuat).
- Nilai koefisien korelasi untuk Kabupaten Batanghari dengan Kabupaten Tanjabbar sebesar 0,251. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Tanjabbar akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Batanghari yang mana $r = 0,251$ atau 25,10 persen (nilai korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Tanjabbar memiliki hubungan positif dengan kemiskinan Kabupaten Batanghari sebesar 25,10 persen atau katagori rendah).
- Nilai koefisien korelasi untuk Kabupaten Batanghari dengan Kabupaten Tanjabtim sebesar 0,523. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Tanjabtim akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Batanghari yang mana $r = 0,523$ atau 52,30 persen (nilai korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Tanjabtim memiliki hubungan positif dengan kemiskinan Kabupaten Batanghari sebesar 52,30 persen atau katagori sedang).
- Nilai koefisien korelasi untuk Kabupaten Batanghari dengan Kabupaten Tebo sebesar 0,095. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Tebo akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Batanghari yang mana $r = 0,095$ atau 9,50 persen (nilai korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Tebo mempunyai hubungan positif dengan kemiskinan Kabupaten Batanghari sebesar 9,50 persen atau katagori sangat rendah).

Kabupaten Bungo

- Nilai koefisien korelasi untuk Kabupaten Bungo dengan Kabupaten Kerinci sebesar 0,192. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Kerinci akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Bungo yang mana $r = 0,192$ atau 19,20 persen (nilai korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Kerinci mempunyai hubungan positif dengan kemiskinan Kabupaten Bungo sebesar 19,20 persen atau katagori sangat rendah).
- Nilai koefisien korelasi untuk Kabupaten Bungo dengan Kota Jambi sebesar 0,090. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kota Jambi akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Bungo yang mana $r = 0,090$ atau 9,00 persen (nilai korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kota Jambi memiliki hubungan positif dengan kemiskinan Kabupaten Bungo sebesar 9,00 persen atau katagori sangat sedang).

- Nilai koefisien korelasi Kabupaten Bungo dengan Kota Sungai Penuh sebesar $-0,640$. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kota Sungai Penuh akan berdampak menurunnya kemiskinan di Kabupaten Bungo yang mana $r = 0,640$ atau 64,00 persen (nilai korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kota Sungai Penuh memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan Kabupaten Bungo sebesar 64,00 persen atau katagori kuat).
- Koefisien korelasi untuk Kabupaten Bungo dengan Kabupaten Merangin bernilai sebesar $0,393$. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Merangin akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Bungo yang mana $r = 0,393$ atau 39,30 persen (nilai korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Merangin memiliki hubungan positif dengan kemiskinan Kabupaten Bungo sebesar 39,30 persen atau katagori sedang).
- Nilai koefisien korelasi Kabupaten Bungo dengan Kabupaten Muaro Jambi sebesar $-0,489$. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi akan berdampak menurunkan kemiskinan di Kabupaten Bungo yang mana $r = 0,489$ atau 48,90 persen (nilai korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Muaro Jambi memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan Kabupaten Bungo sebesar 48,90 persen atau katagori sedang).
- Koefisien korelasi untuk Kabupaten Bungo dengan Kabupaten Sarolangun bernilai sebesar $-0,679$. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Sarolangun akan berdampak menurunkan kemiskinan di Kabupaten Bungo yang mana $r = 0,679$ atau 67,90 persen (angka korelasi ini memberi arti bahwa Kabupaten Sarolangun memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan Kabupaten Bungo sebesar 67,90 persen atau katagori kuat).
- Koefisien korelasi untuk Kabupaten Bungo dengan Kabupaten Tanjabbar sebesar $0,423$. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Tanjabbar akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Bungo yang mana $r = 0,423$ atau 42,30 persen (nilai dari korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Tanjabbar memiliki hubungan positif dengan kemiskinan Kabupaten Bungo sebesar 42,30 persen atau katagori sedang).
- Untuk nilai koefisien korelasi Kabupaten Bungo dengan Kabupaten Tanjabtim sebesar $-0,063$. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Tanjabtim akan berdampak menurunkan kemiskinan di Kabupaten Bungo yang mana $r = 0,063$ atau 6,30 persen (nilai dari korelasi pearson ini dapat memberi arti bahwa Kabupaten Tanjabtim memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan Kabupaten Bungo sebesar 6,30 persen atau katagori sangat rendah).
- Hasil nilai koefisien korelasi Kabupaten Bungo dengan Kabupaten Tebo sebesar $0,454$. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Tebo akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Bungo yang mana $r = 0,454$ atau 45,40 persen (nilai korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Tebo memiliki hubungan positif dengan kemiskinan Kabupaten Bungo sebesar 45,40 persen atau katagori sedang).

Kabupaten Kerinci

- Hasil koefisien korelasi untuk Kabupaten Kerinci dengan Kota Jambi sebesar $0,891$. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kota Jambi akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Kerinci yang mana $r = 0,891$ atau 89,10 persen (nilai dari korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kota Jambi mempunyai hubungan positif dengan kemiskinan Kabupaten Kerinci sebesar 89,10 persen atau katagori sangat kuat).
- Diperoleh nilai koefisien korelasi Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh sebesar $0,507$. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kota Sungai Penuh akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Kerinci yang mana $r = 0,507$ atau 50,70 persen (nilai korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kota Sungai Penuh memiliki hubungan positif dengan kemiskinan Kabupaten Kerinci sebesar 50,70 persen atau katagori sedang).
- Nilai korelasi diatas diperoleh koefisien korelasi Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Merangin sebesar $-0,187$. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Merangin akan berdampak menurunnya kemiskinan di Kabupaten Kerinci yang mana $r = 0,187$ atau 18,70 persen (nilai korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Merangin memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan Kabupaten Kerinci sebesar 18,70 persen atau katagori sangat rendah).
- Nilai koefisien korelasi untuk Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Muaro Jambi sebesar $0,523$. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Kerinci yang mana $r = 0,523$ atau 52,30 persen (nilai korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Muaro Jambi memiliki hubungan positif dengan kemiskinan Kabupaten Kerinci sebesar 52,30 persen atau katagori sedang).
- Untuk koefisien korelasi Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Sarolangun sebesar $0,116$. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Sarolangun akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Kerinci yang mana $r = 0,116$ atau 11,60 persen (nilai korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Sarolangun memiliki hubungan positif dengan kemiskinan Kabupaten Kerinci sebesar 11,60 persen atau katagori sangat rendah).
- Koefisien korelasi untuk Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Tanjabbar bernilai sebesar $0,080$. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Tanjabbar akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Kerinci yang mana $r = 0,080$ atau 8,00 persen (nilai korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Tanjabbar

memiliki hubungan positif dengan kemiskinan Kabupaten Kerinci sebesar 8,00 persen atau katagori sangat rendah).

- Besar koefisien korelasi Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Tanjabtim yaitu bernilai -0,012. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Tanjabtim akan berdampak menurunkan kemiskinan di Kabupaten Kerinci yang mana $r = 0,012$ atau 1,20 persen (nilai korelasi pearson memberi arti bahwa Kabupaten Tanjabtim memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan Kabupaten Kerinci sebesar 1,20 persen atau katagori sangat rendah).
- Koefisien korelasi untuk Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Tebo sebesar -0,069. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Tebo akan berdampak menurunkan kemiskinan di Kabupaten Kerinci yang mana $r = 0,069$ atau 6,90 persen (Nilai korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Tebo memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan Kabupaten Kerinci sebesar 6,90 persen atau katagori sangat rendah).

Kota Jambi

- Nilai dari koefisien korelasi Kota Jambi dengan Kota Sungai Penuh sebesar 0,432. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kota Sungai Penuh akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kota Jambi yang mana $r = 0,432$ atau 43,20 persen (nilai korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kota Sungai Penuh memiliki hubungan positif dengan kemiskinan Kota Jambi sebesar 43,20 persen atau katagori sedang).
- Besar koefisien korelasi Kota Jambi dengan Kabupaten Merangin sebesar -0,130. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Merangin akan berdampak menurunnya kemiskinan di Kota Jambi yang mana $r = 0,130$ atau 13,00 persen (nilai korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Merangin memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan Kota Jambi sebesar 13,00 persen atau katagori sangat rendah).
- Hasil korelasi di peroleh besar nilai koefisien korelasi Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi sebesar 0,714. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kota Jambi yang mana $r = 0,714$ atau 71,40 persen (besar nilai korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Muaro Jambi memiliki hubungan positif dengan kemiskinan Kota Jambi sebesar 71,40 persen atau katagori kuat).
- Koefisien korelasi Kota Jambi dengan Kabupaten Sarolangun sebesar 0,255. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Sarolangun akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kota Jambi yang mana $r = 0,255$ atau 25,50 persen (nilai dari korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Sarolangun memiliki hubungan positif dengan kemiskinan Kota Jambi sebesar 25,50 persen atau katagori rendah).
- Untuk koefisien korelasi Kota Jambi dengan Kabupaten Tanjabbar sebesar 0,155. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Tanjabbar akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kota Jambi yang mana $r = 0,155$ atau 15,50 persen (besar nilai korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Tanjabbar memiliki hubungan positif dengan kemiskinan Kota Jambi sebesar 15,50 persen atau katagori sangat rendah).
- Nilai untuk koefisien korelasi Kota Jambi dengan Kabupaten Tanjabtim sebesar 0,196. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Tanjabtim akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kota Jambi yang mana $r = 0,196$ atau 19,60 persen (nilai korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Tanjabtim memiliki hubungan positif dengan kemiskinan Kota Jambi sebesar 19,60 persen atau katagori sangat rendah).
- Diperoleh besar nilai koefisien korelasi Kota Jambi dengan Kabupaten Tebo sebesar -0,039. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Tebo akan berdampak menurunkan kemiskinan di Kota Jambi yang mana $r = 0,039$ atau 3,90 persen (besar nilai korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Tebo memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan Kota Jambi sebesar 3,90 persen atau katagori sangat rendah).

Kota Sungai Penuh

- Hasil dari koefisien korelasi Kota Sungai Penuh dengan Kabupaten Merangin sebesar -0,516. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Merangin akan berdampak menurunnya kemiskinan di Kota Sungai Penuh yang mana $r = 0,516$ atau 51,60 persen (besar nilai korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Merangin memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan Kota Sungai Penuh sebesar 51,60 persen atau katagori sedang).
- Untuk koefisien korelasi Kota Sungai Penuh dengan Kabupaten Muaro Jambi sebesar 0,654. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kota Sungai Penuh yang mana $r = 0,654$ atau 65,40 persen (nilai korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Muaro Jambi memiliki hubungan positif dengan kemiskinan Kota Sungai Penuh sebesar 65,40 persen atau katagori kuat).
- Nilai dari koefisien korelasi Kota Sungai Penuh dengan Kabupaten Sarolangun sebesar 0,586. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Sarolangun akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kota Sungai Penuh yang mana $r = 0,586$ atau 58,60 persen (nilai dari korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Sarolangun memiliki hubungan positif dengan kemiskinan Kota Sungai Penuh sebesar 58,60 persen atau katagori sedang).
- Koefisien korelasi untuk Kota Sungai Penuh dengan Kabupaten Tanjabbar sebesar -0,366. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Tanjabbar akan berdampak menurunkan kemiskinan di Kota Sungai Penuh

yang mana $r = 0,366$ atau 36,60 persen (nilai dari korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Tanjabbar memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan Kota Jambi sebesar 36,60 persen atau katagori rendah).

- Peroleh nilai koefisien korelasi Kota Sungai Penuh dengan Kabupaten Tanjabtim sebesar $-0,103$. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Tanjabtim akan berdampak menurunkan kemiskinan di Kota Sungai Penuh yang mana $r = 0,103$ atau 10,30 persen (nilai korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Tanjabtim memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan Kota Sungai Penuh sebesar 10,30 persen atau katagori sangat rendah).
- Besar nilai koefisien korelasi Kota Sungai Penuh dengan Kabupaten Tebo sebesar $-0,489$. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Tebo akan berdampak menurunkan kemiskinan di Kota Sungai Penuh yang mana $r = 0,489$ atau 48,90 persen (nilai dari korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Tebo memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan Kota Sungai Penuh sebesar 48,90 persen atau katagori sedang).

Kabupaten Merangin

- Besar nilai dari koefisien korelasi Kabupaten Merangin dengan Kabupaten Muaro Jambi sebesar $-0,604$. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi akan berdampak menurunkan kemiskinan di Kabupaten Merangin yang mana $r = 0,604$ atau 60,40 persen (besar nilai dari korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Muaro Jambi memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan Kabupaten Merangin sebesar 60,40 persen atau katagori kuat).
- Untuk koefisien korelasi Kabupaten Merangin dengan Kabupaten Sarolangun sebesar $0,196$. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Sarolangun akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Merangin yang mana $r = 0,196$ atau 19,60 persen (nilai dari korelasi ini memberi arti bahwa Kabupaten Sarolangun memiliki hubungan positif dengan kemiskinan Kabupaten Merangin sebesar 19,60 persen atau katagori sangat rendah).
- Koefisien korelasi untuk Kabupaten Merangin dengan Kabupaten Tanjabbar sebesar $0,934$. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Tanjabbar akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Merangin yang mana $r = 0,934$ atau 93,40 persen (nilai korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Tanjabbar memiliki hubungan positif dengan kemiskinan Kabupaten Merangin sebesar 93,40 persen atau katagori sangat kuat).
- Besar nilai koefisien korelasi Kabupaten Merangin dengan Kabupaten Tanjabtim yaitu sebesar $0,751$. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Tanjabtim akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Merangin yang mana $r = 0,751$ atau 75,10 persen (nilai korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Tanjabtim memiliki hubungan positif dengan kemiskinan Kabupaten Merangin sebesar 75,10 persen atau katagori kuat).
- Untuk koefisien korelasi Kabupaten Merangin dengan Kabupaten Tebo sebesar $0,958$. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Tebo akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Merangin yang mana $r = 0,958$ atau 95,80 persen (nilai korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Tebo memiliki hubungan positif dengan kemiskinan Kabupaten Merangin sebesar 95,80 persen atau katagori sangat kuat).

Kabupaten Muaro Jambi

- Perolehan nilai koefisien korelasi untuk Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Sarolangun sebesar $0,406$. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Sarolangun akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Muaro Jambi yang mana $r = 0,406$ atau 40,60 persen (nilai dari korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Sarolangun memiliki hubungan positif dengan kemiskinan Kabupaten Muaro Jambi sebesar 40,60 persen atau katagori sedang).
- Koefisien korelasi untuk Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Tanjabbar yaitu bernilai $-0,417$. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Tanjabbar akan berdampak menurunnya kemiskinan di Kabupaten Muaro Jambi yang mana $r = 0,417$ atau 41,70 persen (nilai dari korelasi ini memberi arti bahwa Kabupaten Tanjabbar memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan Kabupaten Muaro Jambi sebesar 41,70 persen atau katagori sedang).
- Untuk besar nilai koefisien korelasi Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Tanjabtim sebesar $-0,081$. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Tanjabtim akan berdampak menurunkan kemiskinan di Kabupaten Muaro Jambi yang mana $r = 0,081$ atau 8,10 persen (nilai korelasi ini memberi arti bahwa Kabupaten Tanjabtim memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan Kabupaten Muaro Jambi sebesar 8,10 persen atau katagori sangat rendah).
- Nilai dari koefisien korelasi Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Tebo sebesar $-0,563$. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Tebo akan berdampak menurunkan kemiskinan di Kabupaten Muaro Jambi yang mana $r = 0,563$ atau 56,30 persen (besar nilai korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Tebo

memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan Kabupaten Muaro Jambi sebesar 56,30 persen atau katagori sedang).

Kabupaten Sarolangun

- Besar nilai dari koefisien korelasi Kabupaten Sarolangun dengan Kabupaten Tanjabbar yaitu sebesar 0,258. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Tanjabbar akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Sarolangun yang mana $r = 0,258$ atau 25,80 persen (nilai dari korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Tanjabbar memiliki hubungan positif dengan kemiskinan Kabupaten Sarolangun sebesar 25,80 persen atau katagori rendah).
- Besar nilai koefisien korelasi Kabupaten Sarolangun dengan Kabupaten Tanjabtim sebesar 0,630. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Tanjabtim akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Sarolangun yang mana $r = 0,630$ atau 63,00 persen (nilai korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Tanjabtim memiliki hubungan positif dengan kemiskinan Kabupaten Sarolangun sebesar 63,00 persen atau katagori kuat).
- Hasil nilai koefisien korelasi untuk Kabupaten Sarolangun dengan Kabupaten Tebo sebesar 0,174. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Tebo akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Sarolangun yang mana $r = 0,174$ atau 17,40 persen (nilai dari korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Tebo memiliki hubungan positif dengan kemiskinan Kabupaten Sarolangun sebesar 17,40 persen atau katagori sangat rendah).

Kabupaten Tanjabbar

- Koefisien korelasi Kabupaten Tanjabbar dengan Kabupaten Tanjabtim bernilai yaitu sebesar 0,849. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Tanjabtim akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Tanjabbar yang mana $r = 0,849$ atau 84,90 persen berarti Kabupaten Tanjabtim mempunyai korelasi positif dengan kemiskinan Kabupaten Tanjabbar sebesar 84,90 persen atau katagori sangat kuat).
- Untuk nilai dari koefisien korelasi Kabupaten Tanjabbar dengan Kabupaten Tebo sebesar 0,966. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Tebo akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Tanjabbar yang mana $r = 0,966$ atau 96,60 persen (nilai korelasi pearson ini memberi arti bahwa Kabupaten Tebo memiliki hubungan positif dengan kemiskinan Kabupaten Tanjabbar sebesar 96,60 persen atau katagori sangat kuat).

Kabupaten Tanjabtim

- Untuk nilai koefisien korelasi Kabupaten Tanjabtim dengan Kabupaten Tebo sebesar 0,792. Artinya jika ada perubahan yang terjadi di Kabupaten Tebo akan berdampak meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Tanjabtim yang mana $r = 0,792$ atau 79,20 persen (nilai korelasi ini memberi arti bahwa Kabupaten Tebo memiliki hubungan positif dengan kemiskinan Kabupaten Tanjabtim sebesar 79,20 persen atau katagori kuat).

SIMPULAN

Secara parsial hanya pengeluaran perkapita (X_{2it}) signifikan dengan penurunan jumlah penduduk miskin daerah di Provinsi Jambi. Berbeda dengan jumlah penduduk (X_{3it}) pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin daerah di Provinsi Jambi dengan perhitungan nilai *R-squared* dimiliki sebesar 99,27 persen selama periode 2010-2020. Sedangkan variabel bebas lainnya tidak signifikan dengan jumlah penduduk miskin daerah di Provinsi Jambi

Hubungan variabel saling keterkaitan antar daerah kabupaten/kota. Dimana untuk peningkatan kemiskinan Kabupaten Batanghari diakibatkan keterkaitan dengan kondisi ekonomi Kota Jambi dengan kategori kuat yaitu 79,40 persen. Penurunan kemiskinan Kabupaten Bungo berkaitan dengan kondisi daerah Kabupaten Sarolangun dengan besar korelasi -67,90 persen dengan kategori kuat, arti kemiskinan Kabupaten Bungo dapat turun akibat keterkaitan kondisi daerah Kabupaten Sarolangun. Untuk Kemiskinan Kabupaten Kerinci peningkatannya disebabkan keterkaitan daerah Kota Jambi dengan besar korelasi 89,10 persen kategori hubungan yang sangat kuat. Untuk Kota Sungai Penuh peningkatan kemiskinannya akibat dari kondisi daerah Kota Jambi dengan besar korelasi 65,40 persen kategori kuat. Untuk Kabupaten Merangin peningkatan kemiskinannya disebabkan keterkaitan dengan kondisi daerah Kabupaten Tebo dengan besar korelasinya 95,80 persen kategori sangat kuat. Untuk peningkatan kemiskinan di Kabupaten Muaro Jambi berkaitan dengan kondisi daerah Kabupaten Batanghari dengan besar korelasi 72,60 persen kategori kuat. Untuk peningkatan kemiskinan di Kabupaten Tanjabbar berkaitan dengan kondisi daerah daerah Kabupaten Tebo dengan besar korelasi 96,60 persen kategori sangat kuat. Dan untuk peningkatan kemiskinan di Kabupaten Tanjabtim berkaitan dengan kondisi daerah Kabupaten Tanjabbar dengan besar korelasi 84,90 persen kategori sangat kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2018. *Teori Ekonomi Makro*. Edisi 3. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Arsyad, L. 2010. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2010. Provinsi Jambi Indonesia: BPS.
- Berardi, N., & Marzo, F. 2017. *The Elasticity of Poverty with respect to Sectoral Growth in Africa. Review of Income and Wealth*. 63(1): 147-168.
- Finkayana, A dan Urmila. D. 2016. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2004-2013. *E-Journal EP Unud*. 5(7).861-881.
- Hasan R, and Quibria M.G. 2002. Poverty and Patterns of Growth. *ERD Working Paper No.18. Economic and Research Department. Asian Development Bank*.
- Jhingan, M. L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Press : Jakarta.
- Jonaidi, A. 2012. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia*, 1(1),
- Khan, A. R. 2007. Growth, Employment And Poverty: An Analysis Of The Vital Nexus Based On Some Recent UNDP and ILO/SIDA studies. *DESA Working Paper No. 49*.
- Kuncoro, M. 2010. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Fokus Media. Jakarta.
- Mankiw, N. G. 2007. *Makro Ekonomi*. Edisi Keenam: Erlangga. Jakarta.
- Rami, B.H Kacem. 2019. University of Carthage. Tunisia. *African Journal of Economic and Management Studies*, 10(1), 48-56.
- Rose, S., dkk. 2013. Growth–Poverty Linkages: Does Sectoral Composition Matter for Pakistan. *World Applied Sciences Journal*. 21(6), 915 –919.
- Sanjaya, dkk. 2018. Analisis Kemiskinan di Kota Pagar Alam. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 16(2), 81-93.
- Siregar, H., & Wahyuni, D. 2007. Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. *Economics Development*. (pertumbuhan ekonomi dan penduduk miskin), 1–28.
- Sjafi'i. A & Hidayati. N.A. 2009. Genjot Anggaran Pendidikan Rendam Kemiskinan, *Gemari*. 101(10), 68-69.
- Sumanto. 2005. *Implementasi PNPM Terhadap Penanggulangan kemiskinan*, Yuditira. Jakarta.
- Syekh, S. 2014. *Pengantar Makro Ekonomi. Revisi*. Gaung Persada Press Group : Jakarta
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kesembilan, Jilid I, Jakarta : Erlangga.